

DAFTAR PUSTAKA

- Marbun B.N. (2007). *Kamus Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Pustaka Sinar.
- Slamet Riyadi. (2014). *Data*. Diambil kembali dari Definisi dan Pengertian Menurut Ahli: <http://www.definisi-pengertian.com/2016/01/pengertian-data-definisi-menurut-ahli.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo 2019. (t.thn.). *Letak Geografis*. Diambil kembali dari www.ponorogokab.bps.go.id:
<https://ponorogokab.bps.go.id/statictable/2015/03/20/192/letak-geografis-.html>
- Diskominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo 2022. (t.thn.). *Kondisi Geografis*. Diambil kembali dari www.kominfo.ponorogo.go.id: <https://kominfo.ponorogo.go.id/>
- DISNAKER 2022. (t.thn.). *Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja*. Diambil kembali dari www.disnaker.ponorogo.go.id: <https://disnaker.ponorogo.go.id/bidang-pelatihan-dan-produktivitas-tenaga-kerja/>
- DISNAKER 2022. (t.thn.). *Tentang Kami*. Diambil kembali dari www.disnaker.ponorogo.go.id: <https://disnaker.ponorogo.go.id/tentang-kami/>
- DISNAKER. (2022). *Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja*. Diambil kembali dari Dinas Tenaga Kerja Ponorogo: <https://disnaker.ponorogo.go.id/bidang-pelatihan-dan-produktivitas-tenaga-kerja/>
- DISNAKER. (2022). *Kebijakan Mutu*. Diambil kembali dari Dinas Tenaga Kerja Ponorogo: <https://disnaker.ponorogo.go.id/kebijakan-mutu/>
- Faridah, J. S. (2021). Doctoral dissrtaion UMSU. *Efektivitas Penerapa Sistem Online Single Submission (OSS) dalam rangk meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Pariwisata di kota Medan* .
- HAP, A. (2019). Doctoral dissertaion Fisp Universitas Jember. *Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus: Izin Usaha Mikro Kecil Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo* .
- Helmi. (2011). Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia. *Dinamika Hukum* , 199.
- Manan, B. (2010). Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945. . *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* , 170.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016. (t.thn.). *Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia*. Diambil kembali dari www.kemnaker.go.id:
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/permen_17_2016.pdf

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016. (t.thn.). *Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016*. Diambil kembali dari www.kemnaker.go.id:
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/permen_17_2016.pdf

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016. (t.thn.). *Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja*. Diambil kembali dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016:
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/permen_17_2016.pdf

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (t.thn.). *Perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja*. Diambil kembali dari Peraturan Perundang-undangan:
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/permen_17_2016.pdf

Oktavia. (2019). *Analisis Penerimaan Sistem Pelayanan Online Single Submission Menggunakan Teori Teknologi Acceptance Model DI Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang* .

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2016. (t.thn.). *Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2016*. Diambil kembali dari www.peraturan.bpk.go.id:
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37575/uu-no-17-tahun-2016>

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018. (t.thn.). *Lembaran Negara Republik Indonesia*. Diambil kembali dari www.peraturan.go.id:
<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2018/pp24-2018bt.pdf>

Putri, H. A. (2018). Prosiding Seniati. *Analisis Regresi Non Linier Model Logistik* , 62-67.

Rachmastika, D. T. (2018). Implementasi Kebijakan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi oleh Upt Pelatihan Kerja Surabaya Sebagai Upaya Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.

Sinambela, L. (2014). Reformasi Peayanan Publik. *Bumi Aksara* .

Sugiyono. (2014). *Analisis Data*. Diambil kembali dari Metode Penelitian:
<http://eprints.umm.ac.id/41437/4/BAB%20III.pdf>

Sugiyono. (2015). *Dokumentasi*. Diambil kembali dari Bab III Metode Penelitian:
<http://repository.unpas.ac.id/30575/5/BAB%20III.pdf>

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian*. Diambil kembali dari Bab III Metode Penelitian:
<https://dspace.uc.ac.id/bitstream/handle/123456789/1340/BAB%20III%20METODE%20PENELITIAN.pdf?sequence=10&isAllowed=y>

Sugiyono. (2015). *Observasi*. Diambil kembali dari Bab III Metode Penelitian:
<http://repository.unpas.ac.id/30575/5/BAB%20III.pdf>

Sugiyono. (2015). *Teknik Pengumpulan Data*. Diambil kembali dari Bab III Metode Penelitian: <http://repository.unpas.ac.id/30575/5/BAB%20III.pdf>

Sugiyono. (2015). *Wawancara*. Diambil kembali dari Bab III Metode Penelitian:
<http://repository.unpas.ac.id/30575/5/BAB%20III.pdf>

Sutedi, A. (2015). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Yogyakarta.

Sutedi, A. (2015). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tahir. (2014). *universitas medan area*. Diambil kembali dari tinjauan pustaka:
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1590/5/141801060_file%205.pdf

Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik Dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta Pusat: Pustaka Indonesia Press.

Ulfa, H. A. (2018). Prosiding Seniati. *Analisis Regresi Non Linier Model Logistik* , 62-67.

Walikota Kota Yogyakarta. (t.thn.). *Peraturan Walikota Yogyakarta*. Diambil kembali dari Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perizinan:
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/18892>

